



Pandangan Akademisi Atma Jaya Yogyakarta atas Demonstrasi Agustus Etnis Tionghoa

Atma Jaya Yogyakarta Academics' Views on the August Demonstrations by Chinese Ethnic Groups

Felisha Olivia Wijaya, Raina Madeleine A

E-mail Korespondensi : 240428010@students.uajy.ac.id

Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Indonesia

Info Article

| Submitted: 25 November 2025 | Revised: 26 December 2025 | Accepted: 3 January 2026

| Published: 10 January 2026

How to cite: Felisha Olivia Wijaya, Raina Madeleine A, "Pandangan Akademisi Atma Jaya Yogyakarta atas Demonstrasi Agustus Etnis Tionghoa", *Sociale : Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 2 No. 1, 2026, p. 1-15.

ABSTRACT

The presence of ethnic Chinese in the Indonesian archipelago has existed since the 15th century, but their social position remains vulnerable due to the legacy of the colonial policy of divide and rule and negative historical stereotypes. This study examines the dynamics of the position of ethnic Chinese within the context of citizenship in Indonesia, focusing on the impact of the August 2025 demonstrations titled "Indonesia Gelap, Revolusi Mulai" (Dark Indonesia, Revolution Begins) in Yogyakarta. Although the constitution guarantees equality, the provocative narratives of ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA) that emerged during these demonstrations exhibited patterns similar to the May 1998 Tragedy, thus evoking collective trauma across generations. Using qualitative descriptive methods, the results show that this social upheaval has had multidimensional impacts: psychologically, through anxiety and a loss of security; socially, through withdrawal from public spaces; and economically, through sluggish business activity. The main factors contributing to the persistence of discrimination are identified as the "foreign group" stereotype inherited from the colonial era, the lack of space for multicultural dialogue, and the widespread disinformation on social media. This study concludes that strengthening character education, creating cross-community dialogue forums in Yogyakarta, and the strategic role of influencers in disseminating inclusive messages are crucial for mitigating racial sentiment and strengthening national integration.

Keywords: Chinese Ethnicity, Discrimination, May 1998 Tragedy, August 2025 Demonstration, SARA, Yogyakarta.

ABSTRAK

Kehadiran etnis Tionghoa di Nusantara telah berlangsung sejak abad ke-15, namun posisi sosial mereka tetap rentan akibat warisan politik kolonial divide et impera dan stereotip sejarah yang negatif. Penelitian ini mengkaji dinamika kedudukan etnis Tionghoa dalam konteks kewarganegaraan di Indonesia, dengan fokus pada dampak aksi demonstrasi Agustus 2025 bertajuk "Indonesia Gelap, Revolusi Dimulai" di Yogyakarta. Meskipun konstitusi menjamin kesetaraan, narasi provokasi SARA yang muncul dalam demonstrasi tersebut menunjukkan pola yang serupa dengan Tragedi Mei 1998, sehingga membangkitkan trauma kolektif lintas generasi. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa gejolak sosial ini menimbulkan dampak multidimensional: secara psikologis berupa kecemasan dan kehilangan rasa aman; secara sosial berupa penarikan diri dari ruang publik; serta secara ekonomi berupa lesunya aktivitas bisnis. Faktor utama langgengnya diskriminasi diidentifikasi berasal dari stereotip "kelompok asing" yang diwariskan sejak masa kolonial, minimnya ruang dialog multikultural, serta masifnya disinformasi di media sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendidikan karakter, penciptaan forum dialog lintas komunitas di Yogyakarta, serta peran strategis influencer dalam menyebarkan pesan inklusif menjadi krusial untuk memitigasi sentimen rasial dan memperkuat integrasi nasional.

Kata Kunci: Etnis Tionghoa, Diskriminasi, Tragedi Mei 1998, Demonstrasi Agustus 2025, SARA, Yogyakarta.



Pendahuluan

Pada abad ke-15 dan ke-16 terdapat beberapa dokumen menunjukkan bahwa komunitas Muslim Tionghoa sudah menetap di sepanjang pesisir utara Jawa (de Graaf & Pigeaud, 1984; Purcell, 1966). Zeng He (Cheng Ho), laksamana muslim yang menjalankan tujuh ekspedisi armada harta karun di samudra Asia Tenggara atas perintah kaisar Dinasti Ming. Kaisar ketiga Dinasti Ming, Zhu Di atau Kaisar Yongle, dikenal dengan memulainya kampanye agresif secara tegas untuk mengalahkan ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Tindakannya mengangkat Dinasti Ming sebagai negeri kuat sebagaimana kejayaan para pendahulu Tiongkok. Oleh sebab itu, sistem upeti tradisional dihadapkan kembali sebagai salah satu simbolik dan memperluas pengaruhnya kekuasaan Dinasti Ming terhadap jaringan di mata kerajaan-kerajaan sekitarnya.

Kehadiran etnis Tionghoa di Indonesia memainkan peran penting dalam transformasi sistem teknologi dibidang pertanian dan perdagangan. Mereka hidup dan berkembang berdampingan dengan etnis pribumi lainnya di wilayah Nusantara. Kelompok etnis Tionghoa yang telah lama tinggal di Indonesia disebut dengan *peranakan*. Pada umumnya mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti masyarakat setempat (Suryadinata, 2010: 183). Sedangkan orang Tionghoa yang datang pada gelombang imigrasi selanjutnya disebut *totok* hal tersebut dikarenakan mereka masih mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai bagian dari negeri Tiongkok, sehingga mereka cenderung menjaga jarak dengan masyarakat setempat dan tetap mempertahankan nilai lokal mereka dan menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa komunikasi sehari-hari.

Meskipun komunitas Tionghoa telah menetap dan berdagang lama di kepulauan Indonesia jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Namun, faktanya bangsa Eropa dengan mudah mengambil peran dalam sistem ekonomi kolonial dengan cepat yang secara tidak langsung, menyebabkan ketidakadilan yang identik dengan ketimpangan sosial dan dalam beberapa kasus, dibenci sebagai agen kolonialisme. Dalam strategi *divide et impera*, penguasa kolonial secara sengaja menempatkan etnis Eropa dan etnis Tionghoa sebagai kelas paling atas, dan kaum pribumi sebagai kelas dua atau kelas tiga.

Wang Gungwu (1987:52) mencatat bahwa pemisahan ekonomis dan sosial antara penduduk lokal dengan etnis Tionghoa menyebabkan posisi politik menjadi rawan. Sehingga, hal tersebut membentuk citra negatif sebagai kelompok asing pemeras (*alien exploiters*) atau dengan kata lain kaki tangan kekuasaan kolonial. Tak hanya itu, perilaku dan sikap cinta kebudayaan terhadap budaya leluhur juga menimbulkan kesan eksklusif dan kecenderungan untuk tidak terlibat dalam mengikuti dinamika politik praktis.

Hingga saat ini, etnis Tionghoa di Indonesia masih dipandang sebagai kelompok perantau- dimana orang yang menumpang hidup dan mencari makan di negeri orang. Walaupun mereka sudah memiliki status resmi sebagai Warga Negara Indonesia, mereka sering kali diasosiasikan dengan berbagai atribusi yang cenderung berkonotasi kurang menyenangkan. Posisi sosial mereka diibaratkan sebagai tamu yang diterima di beranda rumah, namun belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari anggota keluarga.

Tragedi Mei 1998 menjadi salah satu titik kelam posisi sosial etnis Tionghoa di Indonesia. Kejadian tersebut merenggut lebih dari seribu jiwa penduduk keturunan Tionghoa, dengan cara merusak ribuan properti, toko, serta lebih dari seratus pencatatan kasus wanita keturunan Tionghoa yang mengalami kekerasan seksual dalam kurun waktu beberapa hari selama tragedi berlangsung (Herlijanto, 2004; Turner & Allen, 2007). Meskipun terdapat kelompok etnis lain yang ikut turut menjadi korban tindakan kekerasan, baik dari komunitas Tionghoa dan non-Tionghoa, tragedi tersebut dipandang sebagai kerusuhan etnis yang meretakkan sosial yang sangat mendalam (Herlijanto, 2004).

Horowitz (2001), menegaskan bahwa kerusuhan etnis tersebut merupakan serangan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu grup etnis ke grup etnis lain. Meskipun terlihat spontan, kerusuhan tersebut terus menerus mengikuti pola tertentu dan sering kali dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang dijadikan pemberian untuk melancarkan kekerasan (Horowitz, 2001, p.1). Dalam topik ini, kerusuhan etnis dapat dipahami sebagai salah satu cara manifestasi dari akumulasi sentimen negatif yang telah lama dipendam oleh masyarakat pribumi terhadap keturunan Tionghoa di Indonesia.

Pecahnya demonstrasi pada 25 Agustus di Jakarta melalui gerakan 'Indonesia Gelap, Revolusi Dimulai' secara cepat meluas ke beberapa daerah termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai kota yang memiliki predikat sebagai 'Kota Toleransi' dan pusat pendidikan nasional, memunculkan beberapa narasi kebencian rasial. Narasi provokasi yang bernuansa SARA ini menciptakan kebencian terhadap etnis Tionghoa, yang menjadi anomali yang mengkhawatirkan. Kejadian ini menjadi pengingat kembali akan trauma yang dialami oleh etnis Tionghoa khususnya terkait tragedi Mei 1998 dengan tujuan ingin negara Indonesia kembali terpecah belah.

Sentimen negatif yang menyebar muncul melalui ruang digital yang tidak hanya menciptakan ketegangan di jalanan, tetapi juga menembus ruang-ruang privasi dan institusi pendidikan di Yogyakarta, terutama bagi wilayah yang memasuki zona merah kejahatan. Sehingga hal masyarakat harus melakukan evaluasi kembali sejauh mana nilai-nilai multikulturalisme telah terinternalisasi di tingkat akar rumput.

Situasi di Yogyakarta ini mencerminkan adanya *gap* besar antara idealisme Bhineka Tunggal Ika dengan realitas sosial di lapangan. Kurangnya pendidikan multikultural, dan minimnya forum berjumpa lintas etnis yang menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam memproses suatu informasi dan prasangka kuno. Dengan hal ini, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PINTI) menyatakan bahwa pola-pola munculnya kegiatan-kegiatan oknum yang sedang terjadi pada demonstrasi menunjukkan kemiripan dengan peristiwa 1998. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memotret kembali dampak multidimensional yang terjadi dari eskalasi politik di Yogyakarta serta merumuskan pentingnya dialog inklusif sebagai fondasi utama dalam merawat perdamaian di kota pelajar ini.

"Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak demonstrasi Agustus 2025 terhadap etnis Tionghoa di Yogyakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi rasial masih bertahan hingga saat ini."

Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian mengenai respons dosen pendidikan kewarganegaraan Universitas Atma Jaya Yogyakarta terhadap dampak demonstrasi pada Agustus 2025 terhadap etnis Tionghoa di Yogyakarta, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui teknik wawancara. Menurut Sugiono (2005), penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi isi objek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (1975), penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail.

Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara. Menurut Black and Champion (1976), wawancara adalah komunikasi verbal untuk tujuan memperoleh informasi (dari salah satu pihak). Wawancara ini dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Oktober 2025 di Kampus II Gedung Thomas Aquinas, Universitas Atma Jaya Yogyakarta bersama dengan salah satu dosen pendidikan kewarganegaraan Universitas Atma Jaya Yogyakarta bernama Roberto Reno Sitepu, S.S., M.Fil.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Kedudukan Etnis Tionghoa dalam Konteks Kewarganegaraan di Indonesia

1. Keberagaman sebagai Identitas Bangsa

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi semboyan Bhineka Tunggal Ika, di dalam semboyan tersebut mencerminkan keberagaman antar suku, budaya, agama, ras, gender, dan golongan sebagai salah satu bagian dari jati diri bangsa dan “DNA” masyarakat Nusantara yang hidup dari perbedaan dan tumbuh dalam persatuan.

2. Landasan Hukum Kesetaraan

Hal tersebut diwujudkan dalam salah satu perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali dan hal tersebut termasuk warga keturunan Tionghoa.

3. Diskriminasi dalam Sejarah

Namun, nyatanya dalam praktik di lapangan, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, terjadi diskriminasi besar terhadap etnis Tionghoa. Dimana kelompok-kelompok ini dipaksa untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan mengganti nama bernuansa Tionghoa menjadi nama bernuansa Indonesia, meninggalkan agama Konghucu menjadi penganut agama Katolik, dan mengikuti prosedur-prosedur administratif demi memperoleh KTP sebagai WNI.

4. Konflik antara Prinsip dan Praktik

Meskipun secara prinsip dan teori negara Indonesia menghargai adanya keberagaman di sekitar masyarakat, tetapi kenyataannya pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut masih terjadi, sehingga menghambat terpenuhinya hak-hak warga Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

1.2 Aksi Demonstrasi Agustus 2025

1. Demonstrasi sebagai Ekspresi Demokrasi

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk nyata dari partisipasi rakyat dalam kehidupan demokratis. Hal ini pun menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam menyuarakan pendapat, menyampaikan kritik, keprihatinan anak-anak bangsa terhadap kondisi negara saat ini, dan tujuan-tujuan lain yang mulia. Sehingga dalam konteks negara demokratis seperti di Indonesia, demonstrasi bukan hanya sekedar hak, melainkan salah satu cerminan dari semangat kerakyatan masyarakat yang hidup dan dinamis.

2. Penyusupan dan Distorsi Tujuan

Namun kenyataannya, tidak semua demonstrasi berjalan sesuai dengan semangat dan tujuan dari demokrasi yang murni. Tak jarang, banyak aksi-aksi yang dimasukkan oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membawa agenda pribadi, kelompok, maupun pesanan dari pihak-

pihak tertentu untuk menciptakan kerusuhan dan membelokkan arah perjuangan.

3. Bahaya Isu SARA dalam Politik

Situasi ini diibaratkan, melemparkan bensin ke dalam api, seperti: provokasi, kekerasan, hingga penyebaran isu-isu sensitif SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang memperbesar potensi konflik sosial dan menjadikannya semakin sulit untuk dikendalikan.

4. Seruan untuk Kewaspadaan dan Kebijaksanaan

Sehingga, demi menjaga keamanan, himbauan bagi masyarakat dan etnis Tionghoa untuk tidak lagi turun ke jalan dianggap sebagai salah satu langkah yang bijaksana. Dikarenakan banyak masyarakat mulai menyadari bahwa tujuan demonstrasi yang awalnya memiliki tujuan mulia, mulai dibelokkan oleh provokasi-provokasi untuk menyebarkan kebencian terhadap etnis tertentu terutama bagi warga keturunan Tionghoa di Indonesia.

1.3 Dampak Demonstrasi Agustus 2025 Terhadap Etnis Tionghoa di Yogyakarta

1. Dampak psikologis

Bagi banyak warga keturunan Tionghoa, setiap gejolak sosial yang disertai isu rasial membangkitkan kembali ketakutan lama yang berakar dari ketakutan tragedi Mei 1998, ketika kekerasan, penjarahan, dan diskriminasi terjadi secara masif dan brutal selama beberapa hari. Meskipun waktu telah berlalu, luka pada diri mereka belum sepenuhnya sembuh.

Ketakutan bukan merupakan respons sesaat, melainkan salah satu bentuk trauma psikologis yang diwariskan lintas generasi. Rasa terancam tersebut disertai dengan kecemasan yang berlebihan, perasaan tidak aman diruang publik maupun lingkungan sekitar, dan kehilangan rasa percaya terhadap perlindungan negara yang pernah gagal melindungi mereka.

2. Dampak sosial

Menurut sosiolog Mely G. Tan dalam bukunya Etnis Tionghoa di Indonesia, tekanan sosial dan trauma akibat diskriminasi struktural sering kali memaksa kelompok minoritas melakukan penarikan diri dari ruang publik sebagai bentuk strategi pertahanan diri (self-preservation) guna menghindari konflik yang lebih besar.

Terdapat indikasi atau fenomena dimana rakyat etnis Tionghoa menjadi lebih tertutup karena takut mendapatkan diskriminasi. Banyak di antara mereka yang memilih untuk menutup diri dan menghindari ruang publik. "Mengurangi partisipasi rekan-rekan kita yang Tionghoa di ranah publik, terutama menyuarakan isu-isu yang mau diutarakan dalam demonstrasi," ujar Pak Reno. Bahkan universitas pun juga mengimbau mahasiswanya untuk tidak beraktivitas terlebih dahulu di kampus. Contoh riilnya adalah

kegiatan PKKMB mahasiswa baru yang harus ditunda demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kampus.

3. Dampak ekonomi,

Menurut Teori Ketidakpastian Ekonomi (*Economic Uncertainty*) yang dikemukakan oleh Frank Knight, ketidakpastian sosial dan politik yang tinggi dapat melumpuhkan aktivitas pasar karena pelaku ekonomi kehilangan kemampuan untuk memprediksi risiko di masa depan. Kondisi ini sering kali memicu perilaku "bertahan" di mana masyarakat cenderung menahan konsumsi dan investasi.

Hal ini sejalan dengan fenomena di lapangan; karena banyak di antara masyarakat dan kaum etnis Tionghoa yang menutup diri karena ketakutan jika harus keluar rumah, maka hal ini bisa berdampak pada lesunya bisnis secara mendadak. "Toko jadi sepi, atau bahkan tutup, restoran dan lain sebagainya, karena ketakutan mereka jadi tidak berani buka," kata Pak Reno. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara umum, karena kekhawatiran dan situasi sosial yang tidak stabil membuat masyarakat enggan melakukan aktivitas ekonomi di luar rumah. Dampaknya terasa tidak hanya pada sektor perdagangan dan kuliner yang banyak digeluti etnis Tionghoa, tetapi juga pada rantai pasokan dan jasa pendukung lainnya seperti transportasi, logistik, serta pemasok bahan makanan.

1.4 Penyebab Masih Adanya Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa di Yogyakarta Hingga Saat Ini

1. Warisan sejarah dan stereotip

Dalam studi sosiologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Kambing Hitam (*Scapegoat Theory*) yang dirumuskan oleh Gordon Allport dalam bukunya *The Nature of Prejudice*. Teori ini menyatakan bahwa ketika sebuah kelompok mengalami frustrasi atau krisis, mereka cenderung melampiaskan agresi dan kesalahan kepada kelompok minoritas yang secara historis sudah memiliki posisi rentan atau dianggap berbeda.

Hal ini relevan dengan pandangan Pak Reno, bahwa dahulu kala nenek moyang etnis Tionghoa dianggap mendukung penjajah Belanda saat agresi militer terjadi. Hal ini pun menjadi akar masalah yang akhirnya menimbulkan kebencian dan kecurigaan dari kaum pribumi terhadap etnis Tionghoa. Stereotip inilah yang kemudian diwariskan turun-temurun dan membuat keturunan etnis Tionghoa hingga kini masih mendapat perlakuan yang tidak adil dari masyarakat mayoritas.

Pandangan historis yang tidak sepenuhnya benar tersebut membentuk narasi sosial yang menyudutkan etnis Tionghoa, seolah mereka adalah kelompok yang eksklusif, lebih mementingkan ekonomi, dan tidak memiliki

rasa nasionalisme terhadap Indonesia. Padahal, dalam kenyataannya, banyak warga keturunan Tionghoa yang telah berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Namun karena persepsi negatif itu sudah terlanjur mengakar, maka upaya untuk menghapus stigma tersebut menjadi tantangan tersendiri.

Lebih lanjut, stereotip ini juga diperkuat oleh minimnya pengetahuan sejarah yang objektif di kalangan masyarakat. Banyak orang hanya mengenal narasi dari sudut pandang mayoritas tanpa memahami konteks sosial dan politik pada masa penjajahan. Akibatnya, etnis Tionghoa sering dijadikan kambing hitam ketika terjadi krisis sosial atau ekonomi. Dalam konteks ini, peran pendidikan, media, dan tokoh masyarakat menjadi sangat penting untuk meluruskan pemahaman sejarah, agar generasi muda tidak lagi terjebak pada prasangka lama yang tidak berdasar.

2. Kurangnya pendidikan multikultural

Menurut Teori Segregasi Sosial, pemisahan kelompok secara sukarela (self-segregation) dalam lingkungan pendidikan dapat menghambat terbentuknya modal sosial dan memperkuat batas-batas identitas yang eksklusif. Hal ini diperparah oleh kurangnya penerapan Pedagogi Kritis sebagaimana dikemukakan oleh Paulo Freire, yang menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi ruang dialogis untuk memecahkan sekat-sekat sosial, bukan sekadar tempat transfer ilmu akademik.

Kondisi ini tercermin di sekolah-sekolah bahkan di tingkat perguruan tinggi, di mana budaya berdialog dan berinteraksi lintas perbedaan masih belum menjadi kebiasaan yang kuat. Banyak siswa maupun mahasiswa yang cenderung bergaul hanya dalam kelompok yang homogen – baik berdasarkan ras, agama, suku, maupun latar belakang sosial ekonomi. “Mereka dibiasakan dalam pergaulannya ya dengan circle-circle itu aja gitu ya. Kurang berbaur, kurang difasilitasi untuk bisa bertemu, berdialog dengan rekan-rekan yang berbeda. Akibatnya apa? Gak bertemu, gak berbicara, gak berdialog, maka yang muncul adalah asumsi-asumsi dan tindakan-tindakan yang didasari hanya oleh asumsi yang bisa jadi keliru,” ungkap Pak Reno.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan formal di Indonesia masih lebih banyak menekankan aspek akademik dibandingkan penguatan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Padahal, proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga melalui interaksi sosial yang melatih empati, rasa saling menghargai, dan kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain. Tanpa adanya ruang yang mendorong dialog lintas perbedaan, siswa dan mahasiswa rentan memiliki pemikiran yang sempit dan mudah terpengaruh oleh prasangka sosial yang berkembang di masyarakat.

3. Disinformasi / *miss informasi* / *hoax* yang berkembang di media sosial
Menurut teori Efek Disinhibisi Online (Online Disinhibition Effect), ruang digital sering kali mengurangi kendali diri seseorang karena adanya anonimitas dan jarak fisik, sehingga individu merasa lebih bebas untuk mengekspresikan agresi atau kebencian dibandingkan saat berinteraksi di dunia nyata.

Zaman yang semakin canggih membawa kemudahan luar biasa dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Melalui media sosial, setiap individu kini memiliki kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan opini kepada publik. Namun, kebebasan ini sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti penyebar hoaks, provokator, dan akun-akun anonim yang menebar ujaran kebencian. Fenomena ini memperlihatkan sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi, di mana ruang digital yang seharusnya menjadi sarana edukasi dan pertukaran gagasan justru dijadikan alat untuk menebar kebencian dan perpecahan sosial.

Bahkan, menurut Pak Reno, penyebaran ujaran kebencian di media sosial sulit dikendalikan karena hampir seluruh lapisan masyarakat kini terhubung secara digital. Informasi dapat menyebar secara masif hanya dalam hitungan detik, tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. "Ya pemerintah mungkin bisa melakukan blokir ini, blokir itu ya, tapi ya seperti kata orang ya, mati satu tumbuh seribu. Blokir satu muncul lebih banyak daripada itu," ujar Pak Reno. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup untuk mengatasi penyebaran informasi berbahaya di dunia maya.

4. Dialog antar komunitas masih minim di Yogyakarta

Dalam perspektif sosiologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep Modal Sosial (*Social Capital*), khususnya tipe Bridging Social Capital yang dikembangkan oleh Robert Putnam. Teori ini menekankan bahwa kemajuan suatu wilayah bergantung pada adanya "jembatan" atau jaringan komunikasi antar-kelompok yang berbeda latar belakang. Tanpa adanya ruang untuk membangun modal sosial ini, masyarakat cenderung terjebak dalam kelompoknya sendiri (*bonding*), yang justru dapat memicu eksklusivitas dan prasangka sosial.

Hal ini sejalan dengan pendapat Pak Reno bahwa dari pengamatan beliau, forum untuk membicarakan atau mendialogkan perbedaan, termasuk perbedaan etnis, masih sangat minim di Yogyakarta. Padahal, kota ini dikenal sebagai kota pelajar dan pusat keberagaman, di mana banyak pendatang dari berbagai daerah di Nusantara datang untuk menempuh pendidikan maupun bekerja. Namun, potensi keberagaman tersebut belum

sepenuhnya dimanfaatkan sebagai ruang untuk membangun pemahaman lintas budaya.

Beliau menekankan bahwa kurangnya ruang dialog menyebabkan kesenjangan sosial dan munculnya prasangka antar kelompok. Banyak masyarakat yang akhirnya hidup dalam lingkaran sosial yang homogen dan jarang berinteraksi dengan kelompok berbeda etnis atau agama. Akibatnya, muncul asumsi-asumsi keliru yang tidak didasari oleh pemahaman langsung, melainkan oleh opini dan stereotip yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi seperti ini, jika terus dibiarkan, dapat menciptakan sekat-sekat tak terlihat di tengah masyarakat.

Pak Reno juga menambahkan bahwa pendidikan karakter dan dialog antar komunitas perlu menjadi bagian penting dari kehidupan sosial di Yogyakarta, baik di lingkungan pendidikan, komunitas, maupun instansi pemerintah. Kegiatan seperti diskusi lintas budaya, kolaborasi antar organisasi mahasiswa, serta pelatihan toleransi bisa menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan empati dan saling pengertian. Beliau menegaskan, "Maka sekali lagi saya menekankan pendidikan karakter, forum untuk berjumpa, berdialog, dan bekerja sama itu mesti ditingkatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai respons terhadap isu sentimen rasial, termasuk yang menimpa saudara-saudari kita yang beretnis Tionghoa."

1.5 Peran *Influencer* dalam Menyuarkan Ketertiban dalam Berdemonstrasi

Menurut Teori Komunikasi Dua Tahap (*Two-Step Flow Theory*) yang dikembangkan oleh Paul Lazarsfeld, informasi dari media massa tidak langsung memengaruhi masyarakat luas, melainkan disaring dan diperkuat oleh para pemimpin opini (*opinion leaders*) atau yang kini dikenal sebagai influencer. Dalam konteks ini, influencer berfungsi sebagai gerbang informasi yang menentukan apakah sebuah pesan akan diterima sebagai kebenaran atau justru memicu penolakan sosial di tingkat akar rumput.

Hal ini relevan dengan kondisi di era digital saat ini, di mana peran influencer memang sangat besar karena mereka memiliki jangkauan dan kekuatan opini yang dapat memengaruhi pola pikir, sikap, dan bahkan perilaku masyarakat luas. Namun, pengaruh ini menjadi pedang bermata dua; di satu sisi dapat digunakan untuk menebarkan pesan kebaikan, namun di sisi lain bisa pula memperkuat perpecahan sosial apabila disalahgunakan. Beberapa influencer menggunakan popularitasnya untuk menyebarkan ujaran kebencian, memperkeruh isu SARA, atau bahkan menormalisasi perilaku diskriminatif. Hal ini tentu berbahaya, sebab opini yang diucapkan di media sosial dapat dengan cepat menyebar dan membentuk persepsi publik, terutama di kalangan anak muda yang masih mudah terpengaruh oleh tren dan figur publik.

Sebaliknya, influencer yang membawa dampak positif justru memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran sosial dan memperkuat nilai-nilai toleransi di masyarakat. Mereka tidak hanya menjadi panutan dalam gaya hidup, tetapi juga dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dengan cara menyebarkan pesan-pesan edukatif, inklusif, dan penuh empati. Influencer seperti ini dapat membantu mengarahkan perhatian publik untuk memahami isu-isu penting seperti diskriminasi, keberagaman, dan pentingnya hidup berdampingan secara damai. "Alangkah baiknya jika yang diviralkan adalah pesan-pesan yang baik, pesan-pesan yang bernada inklusif, pesan-pesan yang mau merangkul, mau menyadari, mau menghargai perbedaan, dan mau saling mengenali dan bekerja sama untuk menciptakan, mewujudkan masyarakat yang lebih baik," ungkap Pak Reno.

Penutup

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa demonstrasi Agustus 2025 memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan komunitas etnis Tionghoa di Yogyakarta. Aksi yang pada awalnya dimaksudkan sebagai sarana penyampaian aspirasi rakyat justru berubah menjadi ruang yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan isu SARA. Akibatnya, muncul rasa takut, keresahan, dan tekanan psikologis di kalangan masyarakat Tionghoa. Dampak ini tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga meluas ke aspek sosial dan ekonomi, di mana banyak pelaku usaha keturunan Tionghoa memilih menutup diri dan menghentikan sementara aktivitas mereka karena kekhawatiran terhadap situasi yang tidak menentu.

Secara lebih mendalam, fenomena ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa masih berakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Walaupun secara hukum seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, realitas sosial masih memperlihatkan ketimpangan dan prasangka yang diwariskan secara turun-temurun. Stereotip yang muncul akibat warisan sejarah, minimnya pendidikan multikultural, serta lemahnya ruang dialog antar kelompok menjadi faktor yang memperkuat jarak sosial antara masyarakat mayoritas dan warga keturunan Tionghoa.

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial turut memperburuk situasi. Arus informasi yang cepat sering kali disalahgunakan oleh oknum untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang menargetkan isu ras dan agama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat literasi digital, pendidikan karakter, serta pemahaman nilai-nilai

toleransi dalam kehidupan berbangsa. Dengan memperkuat solidaritas sosial, memperluas dialog lintas budaya, dan menegakkan keadilan secara konsisten, Indonesia dapat benar-benar mewujudkan cita-cita persatuan dalam keberagaman sebagaimana makna sejati dari Bhinneka Tunggal Ika.

Saran

Untuk itu, diperlukan upaya nyata dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penyebaran isu SARA dan menindak tegas provokasi serta ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Lembaga pendidikan diharapkan dapat memperkuat pendidikan karakter berbasis toleransi dan keberagaman sejak dini.

Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar lebih kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial. *Influencer* dan tokoh masyarakat pun sebaiknya mengambil peran aktif dalam menyebarkan pesan-pesan damai, persatuan, dan saling menghargai. Dengan sinergi seluruh elemen bangsa, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang benar-benar mencerminkan makna Bhinneka Tunggal Ika – berbeda-beda tetapi tetap satu.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roberto Reno Sitepu, S.S., M.Fil., selaku dosen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah dengan penuh kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. Melalui wawancara yang mendalam dan pandangan beliau yang kritis, penelitian ini memperoleh banyak pemahaman baru terkait isu kewarganegaraan, diskriminasi, dan dinamika sosial etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Kontribusi dan perspektif yang diberikan oleh beliau menjadi bagian penting dalam memperkaya hasil analisis penelitian ini.

Selain itu, kami juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hastangka, Dr. Achmadi, M.Phil., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan akademik selama proses penelitian berlangsung. Berkat masukan, koreksi, dan semangat yang beliau berikan, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan karya ini dengan lebih baik dan terarah.

Daftar Pustaka

- Aryani, M. K. (2020). INPRES No. 14 Tahun 1967: Bentuk diskriminasi pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa. JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah, 2(2). <https://online-journal.unja.ac.id/jejak/article/view/21627>
- Bachrun, R., & Hartanto, B. (2000). Krisis identitas diri pada kelompok minoritas Cina. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/328980214_Krisis_Identitas_Etnis_Cina_di_Indonesia
- Ginting, S. O., M, S., & Ekwandari, Y. (2019). Etnis Tionghoa pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Journal of PESAGI: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, 7(5). <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/19728/pdf>
- Gumilang, N. A. (2025, 20 Oktober). Pengertian penelitian kualitatif. Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-kualitatif/>
- Khasanah, A. (2018). Eksistensi etnis Tionghoa di era globalisasi. Jurnal Kewarganegaraan, 2(2), 28. <https://doi.org/10.31316/jk.v2i2.1292>
- Kompas. (2025). Alarm dari indeks konsumen. <https://www.kompas.id/artikel/alarm-dari-indeks-konsumen>
- Lan, T. J. (1998). Pengalaman etnik Cina dalam pembentukan identitas (nasional) Indonesia. JPMB: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v2i9.6103>
- Manajemen SDM. (n.d.). Teori komunikasi dua tahap: Dari media massa ke pemimpin opini. <https://manajemen-sdm.com/special/teori-komunikasi-dua-tahap-dari-media-massa-ke-pemimpin-opini/>
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2010). Analisis pertumbuhan ekonomi dan sektor potensial: Studi empiris di Kabupaten Mamuju Utara periode 2008-2013. Neliti, 1(1), 188. www.neliti.com
- Nusantara. (n.d.). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/794>
- Ramadhani, M. T. D. (2025, 30 Agustus). Waspada! Broadcast ajakan benci keturunan Cina dan demo di bandara tengah beredar, warga jangan terhasut!. Redaksi 8. <https://redaksi8.com/>
- Ruangobrol. (2024). The cyber effect: Sebuah refleksi terhadap rekrutmen online kelompok ekstrimis. <https://ruangobrol.id/berita/roe170647599453e8298/the-cyber-effect-sebuah-refleksi-terhadap-rekrutmen-online-kelompok-ekstrimis>
- Saribu, Y. (2018). Tinjauan konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan di depan hukum pada proses penangkapan bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Lex Administratum,

- 6(1),
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/20332>
- Sari, N. P. (2024). Potential and obstacles in cultural heritage development in Tanjungpinang City. JPMB: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari, 2(9), 799. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v2i9.6103>
- Sitorus, O. (2024). Devide Et Impera: Kebijakan politik Belanda dalam memecah persatuan di Nusantara. Journal of Education and Learning Evaluation, 1(2), 316. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4007>
- Utomo, P. (2024, 10 Mei). Cheng Ho, Laksamana Muslim yang melegenda berkat ambisi Dinasti Ming. National Geographic Indonesia. <https://nationalgeographic.grid.id>
- Wang, G. (1988). Tionghoa dan orang Tionghoa di luar negeri. The China, Quarterly, 136(1), 934. <https://doi.org/10.1017/S0305741000032392>
- Wibowo, P. (2010). Tionghoa dalam keberagaman Indonesia: Sebuah perspektif historis tentang posisi dan identitas. International Conference on South East Asian Studies (ICSSIS). <https://icssis.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/05/09102012-52.pdf>
- Wijayanti, Y. (2022). Kedudukan etnis Tionghoa dalam multikulturalisme Indonesia: Antara harapan dan kenyataan. Jurnal Artefak, 9(2), 142. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/8425>
- Zulfa, et al. (n.d.). JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Muslim Indonesia. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/346>

Biografi Singkat Penulis



Felisha Olivia Wijaya, lahir di Yogyakarta pada 5 April 2006. Saat ini tengah menepuh pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Manajemen, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Di luar kegiatan akademiknya, ia pernah menulis dan menerbitkan dua artikel di Kompasiana. Penulis dapat dihubungi melalui email: 240328007@students.uajy.ac.id.



Raina Madeleine Allbright, lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 November 2006. Saat ini sedang menempuh pendidikan Program Studi Akuntansi, di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Di samping aktivitas akademiknya, pada tahun 2023 ia telah menulis dan menerbitkan buku berjudul *Kepingan Jiwa*, yang menceritakan beberapa kumpulan cerita pendek. Ia dapat dihubungi melalui email: 240428010@students.uajy.ac.id.